

BAB II

METODOLOGI PENDAMPINGAN PARTISIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)

A. Pengertian PAR

PAR tidak memiliki sebutan tunggal. Dalam berbagai literatur, PAR bias di sebut dengan berbagai sebutan, di antaranya adalah : *Action research, learning by doing, action learning, action science, action inquiry, collaborative research, partisipatory action research, policy-oriented action research, emancipatory research, conscientizing research, collaborative inquiry, participatory action learning, dan dialectical research.*¹

Sesungguhnya tidak ada definisi baku mengenai apa yang di maksud dengan participatory action research, namun demikian beberapa definisi telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut yoland wadworth, PAR adalah istilah yang memuat seperangkat asumsi yang mendasari paradigm baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan traddisional atau kuno. Asumsi-asumsi mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa implikasi perubahannya” yang di pandang berguna oleh orang-orang yang berada pada situasi problematis dalam mengantarkan untuk melakukan

¹ Agus afandi,dkk. *Modal Participatory Action Research*, (surabaya:LPPM UIN sunan ampel,2014),hal.89

penelitian awal.

Par pada dasarnya melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain lain terkait.yang mendasari di lakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang di inginkan.

PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi, semua riset harus di implementasikan dalam aksi. Betapapun juga, riset mempunyai akibat-akibat yang di timbulkannya, segala sesuatu berubah sebagai akibat dari riset. Situasi baru yang di akibatkan riset bias jadi berbeda dengan situasi sebelumnya. PAR merupakan intervensi sadar yang tak terelakkan terhadap situasi soisal, riset berbasis par PAR di rancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka merubah dan melakukan perbaikan terhadapnya. Hal ini seringkali muncul dari situasi yang tidak memuaskan yang kemudian mendorong keinginan untuk berubah kepada situasi yang lebih baik. Namun, ia bias juga muncul dari pengalaman yang sudah berlangsung secara baik yang mendorong keinginan untuk memproduksi

kembali atau menyebarkannya.²

Salah satu kunci keberhasilan PAR adalah membangun tim PAR yang sangat meyakini kebenaran proses PAR dan nilai-nilai PAR. Harus di ingat bahwa komitmen terhadap PAR dan proses kebersamaan atau kerja sama merupakan kunci sukses.

B. Cara Kerja PAR

yang menjadi landasan dalam cara kerja PAR, terutama adalah gagasan-gagasan yang datang dari rakyat. Oleh karena itu , pendamping PAR harus melakukan cara kerja sebagai berikut. 1) perhatikan dengan sungguh-sungguh gagasan yang datang dari masyarakat yang masih terpeleceh dan belum sistematis. 2)pelajari gagasan tersebut secara bersama-sama dengan mereka sehingga menjadi gagasan yang sistematis. 3) menyatulah dengan rakyat. 4) kaji kembali gagasan yang datang dari mereka sehingga mereka sadar dan memahami bahwa gagasan itu milik mereka sendiri, 5) terjemahkan gagasan tersebut dalam bentuk aksi, 6) uji kebenaran gagasan melalui aksi, 7) dan seterusnya berulang-ulang sehingga gagasan tersebut menjadi benar.

C. Prinsip-Prinsip PAR

Pradigma ilmu sosial kritis yang memihak pada kaum tertindas, merupakan prinsip utama atau bahkan menjadi prinsip mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pengorganisir masyarakat. Pada dasarnya, prinsip

² Agus Afandi, dkk. *ibid.* hal.91

mengorganisir masyarakat adalah menyangkut sikap dan pilihan yang jelas dan tegas untuk berpihak kepada rakyat yang dizalimi dan tertindas. Karena itulah sarat dengan pilihan-pilihan nilai, kaidah, keyakinan, dan pemahaman masyarakat dan bagaimana agar keadilan, perdamaian dan hak-hak asasi manusia ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Prinsip pengorganisir masyarakat yang harus dimiliki dan dibangun dalam diri para pengorganisir masyarakat (*community organizer*) adalah meliputi;

1. Membangun etos dan komitmen organizer. Etos dan komitmen seorang *community organizer* merupakan prinsip utama agar mampu bertahan menghadapi banyak tantangan dan berhasil membawa sebuah perubahan bersama masyarakat. Karena, menjadi seorang *community organizer* berarti terlibat dalam suatu proses perjuangan seumur hidup yang menuntut tanggung jawab besar sebagai pengorganisir rakyat yang lebih besar.
2. Keberpihakan dan pembebasan terhadap kaum lemah.
3. Berbaur dan terlibat (*live in*) dalam kehidupan masyarakat.
4. Belajar bersama rakyat, merencanakan bersama, dan membangun dengan apa yang mereka punya.
5. Kemandirian. Kemandirian merupakan prinsip yang dipegang baik dalam sikap politik, budaya, maupun dalam memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang ada. Seorang *community organizer* hanya akan dianggap selesai dan berhasil melakukan pekerjaannya jika masyarakat yang diorganisirnya telah mampu mengorganisir diri mereka sendiri (*local*

leader), sehingga tidak lagi memerlukan *organizer* luar yang memfasilitasi mereka.

6. Berkelanjutan, setiap kegiatan pengorganisasian di orientasikan sebagian suatu yang terus-menerus dilakukan. Tiap langkah dalam pengembangan komunitas ditempatkan dalam satu kerangka kegiatan yang terus-menerus.
7. Keterbukaan dengan prinsip ini, setiap anggota komunitas dirancang untuk mengetahui masalah-masalah yang akan dilakukan dan sedang dihadapi oleh komunitas.
8. Partisipasi, setiap anggota komunitas memiliki peluang yang sama terhadap informasi maupun terhadap proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh komunitas. satu sisi seorang pengorganisi masyarakat memang dituntut mampu menstimulasi masyarakat dan mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam proses pengorganisasi mereka sendiri misalnya dengan memfasilitasi proses pelatihan, pertemuan, hingga dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan ruang dan peluang yang terbuka dan sama bagi setiap anggota (masyarakat) untuk ikut ambil bagian dalam proses tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa partisipasi tidak selalu menuju pada suatu pemberdayaan. Dibutuhkan lingkungan yang mendukung untuk menumbuhkan aspirasi masyarakat dan kemampuan supaya pemberdayaan dapat terjadi.

Menurut David Wilcox bahwa ada beberapa cara ini yaitu:

- a) Tidak menyepelkan orang. Berikan mereka (para partisipasi) peralatan

yang memudahkan untuk dapat mengatur kompleksitas latar dan masalah diantara mereka sendiri.

- b) Mengelompokkan / membagi masalah menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dicerna,
- c) Mulaidengan masalah isu yang berhubungan dengan mereka secara langsung,
- d) Tidak memasak ide dan solusi pribadi terhadap permasalahan yang ada.
- e) Membantu orang-orang untuk memperlebar persepsi mereka akan pilihan-pilihan yang ada dan membantu menjelaskan implikasi-implikasi akan setiap pilihan.
- f) Membangun gambaran akan sukses-sukses awal yang dapat diraih untuk mengembangkan keyakinan para partisipan.
- g) Kemampuan “jenjang tangga”, kepercayaan dan kometmen terhadap prose; tawarkan beberapa pilihan yang progresif akan level keterlibatan dan membantu mereka untuk terus naik ke jenjang yang lebih tinggi.
- h) Pelatihan pemberdayaan langsung untuk para peserta mungkin tidak terlalu dihargai.Karena itu, mungkin lebih baik untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan secara organic sebagai bagian dari proses.
- i) Selama memungkinkan, hindari solusi yang takdapat dikembalikan ke situasi semula. Susunlah proses pembelajaran yang interaktif,dengan

pilot dan pengalaman yang kecil, cepat, dan dapat dikembalikan.

- j) Terus-menerus mengulas dan memperlebar keanggotan. Ketika ketertarikan-ketertarikan group (kelompok) sudah diketahui, bagaimana untuk menyatukan mereka kedalam proses.
- k) Membantu orang-orang untuk membangun pengertian mereka akan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan jarak jauh yang berada diluar kekuasaan dari proses partisipasi tetapi akan mempengaruhi hasil akhir (l) Membangun *network* dan alisis baru.
- l) Rencana-rencana harus berarti dan menjurus kepada aksi.
- m) Mengatur hubungan antara kemampuan pribadi atas beberapa group yang berbeda untuk menyampaikan kometmen mereka, kepercayaan public, dan control akan implemetasinya.
- n) Membangun kesempatan-kesempatan untuk refleksi dan penilaian.
- o) Pastikan orang-orang bergembira.

Prinsip lain yang harus di miliki oleh seorang pendamping yaitu:

Pertama, Prinsip Partisipasi. Prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan separtisipatif mungkin, melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, PAR dilakukan bersama di antara warga masyarakat melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatarbelakangi warga saat terlibat

dalam PAR, termasuk penghargaan pada kesetaraan jender (terlebih jika dalam suatu komunitas warga perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial). Berbeda dengan riset konvensional, tim peneliti dalam PAR bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.

Kedua, Prinsip Orientasi Aksi. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret.

Ketiga, Prinsip Triangulasi. PAR harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga/ elemen masyarakat (crosscheck). Prinsip ini menuntut PAR mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan. Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan, statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembandingan.

Keempat, Prinsip Luwes atau Fleksibel. Meskipun PAR dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati,

peneliti bersama warga harus tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasinya yang dipaksa sesuai dengan Desain riset, melainkan Desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

D. Teknik dan Langkah Pengorganisasian Masyarakat

Keseluruhan proses pengorganisasian masyarakat terdiri dari serangkaian tahapan yang berkaitan satu sama lain sebagai kesatuan terpadu. Namun, semua proses atau tahapan dalam pengorganisasian masyarakat tidak selalu ketat berurutan dan tentu saja seorang pengorganisir yang baik tidak dapat hanya melakukan salah satunya dan mengabaikan yang lainnya. Dalam kenyatannya, seorang pengorganisir memang mungkin sepenuhnya berada pada suatu tahap tertentu saja pada suatu saat tertentu pula.³

Secara umum dan sederhana, tahapan proses yang sekaligus menjadi langkah-langkah pengorganisasian masyarakat dapat di uraikan sebagai berikut.

1. Memulai Pendekatan.

Memulai pendekatan terhadap kelompok, slalu memerlukan apa yang selama ini dikenal sebagai ”pintu masuk”(*entry point*) atau “kunci” yang menentukan untuk memulai membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Hal ini tentu membutuhkan persiapan yang matang sebelum terjun

³ Agus Afandi, dkk. *Modal Participatory Action Research*, (Surabaya: LPPM UIN sunan ampel, 2014), hlm.208

mengorganisir komunitas. Karena itu hal yang penting yang perlu dipersiapkan pada tahap ini adalah pemahaman tentang komunitas sehingga perlu pemetaan pendahuluan (*preliminary mapping*). Hal-hal yang diketahui pada pemetaan pendahuluan ini seperti informasi lebih detail tentang komunitas, kondisi sosio demografisnya, karakteristik masyarakat, nilai-nilai yang dianut, adat-istiadat yang berlaku, serta isu-isu yang akan diangkat dan ditangani bersama komunitas. Setelah itu . pendekatan dilakukan dengan membaur atau berintegritasi menyatu dengan komunitas (*live with them.*)⁴

2. Investigasi Sosial (Riset Partisipatoris)

Tahap ini merupakan kegiatan riset (penelitian) untuk mencari dan menggali akar persoalan secara sistematis dengan cara partisipatif. Organizer terlibat dalam kehidupan komunitas langsung dan bersama-sama komunitas. Pengorganisir merupakan beberapa masalah yang kemudian bersama anggota komunitas melakukan upaya klasifikasi menentukan masalah apa yang paling kuat dan mendesak untuk didiskusikan bersama.

3. Memfasilitasi Proses.

Salah satu fungsi paling pokok dari seorang pengorganisir, baik yang berasal dari masyarakat setempat ataupun yang berasal dari luar, adalah memfasilitasi masyarakat yang di organisirnya. Mefasilitasinya dalam pengertian ini tidak hanya berarti memfasilitasi proses-proses pelatihan atau pertemuan saja. Seorang pengorganisir fasilitator adalah seorang yang

⁴ Agus Afandi,dkk. *Ibid.* hal: 210

memahami peran-peran yang dijalankannya di masyarakat serta memiliki ketrampilan teknis menjalankannya, yakni ketrampilan memfasilitasi proses-proses yang membantu, memperlancar, dan mempermudah masyarakat setempat agar pada akhirnya mampu melakukan sendiri semua peranan yang dijalankan seorang pengorganisir

4. Merancang Strategi

Merancang dan merumuskan strategi dalam pengorganisasian masyarakat benar-benar diarahkan untuk melakukan dan mencapai perubahan sosial yang lebih besar dan lebih luas di tengah masyarakat. Beberapa uraian langkah berikut dapat membantu dan memahami tentang perumusan strategi kearah perubahan sosia:

1. Menganalisis keadaan (pada mikro maupun makro)
2. Merumuskan kebutuhan dan keinginan masyarakat
3. Menilai sumber daya dan kemampuan masyarakat
4. Menilai kekuatan dan kelemahan masyarakat sendiri dan “lawannya”
5. Merumuskan bentuk tindakan dan upaya yang tepat dan kreatif

5. Merancang Aksi (Tindakan)

Setelah tersusun perencanaan yang matang berupa rancangan isu-isu strategis, langkah selanjutnya adalah mengorganisir aksi bersama komunitas untuk melakukan suatu aksi (tindakan) yang memungkinkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat sebesar-besarnya dalam penyelesaian masalah mereka sendiri. Dalam pengerahan aksi ini, kata kuncinya adalah partisipasi

komunitas(masyarakat).Oleh karena itu, seorang *organizer*(fasilator) dikatakan berhasil jika mampu mendorong dan membiarkan “mereka”(masyarakat) menjadi dominan,untuk menentukan lebih banyak agenda, untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi serta membuat rencana.

Proses pengerahan aksi bisa diawali dari penentuan akan isu-isu yang matang untuk membahas masalah dan bagai mana bentuk aksi penyelesaian melalui diskusi-diskusi atau pertemuan bersama komunitas (*Focus Group Discussion*);kegiatan agitasi atau propaganda dengan harapan anggota komunitas akan tergerak untuk secara bersama-sama melakukan suatu tindakan,mobilisasi massa dalam kelompok kecil ataupun besar yang bersifat massif, negosiasi antara wakil komunitas dengan pihak yang dituntut;serta membentuk opini publik melalui media massa atau media populer.

6. Menata Organisasi dan Keberlangungannya

Mengorganisir masyarakat juga berarti membangun dan mengembangkan suatu Dalam pengertian ini, membangun organisasi masyarakat adalah juga berarti membangun dan mengembangkan suatu struktur dan mekanisme yang menjadikan mereka, pada akhirnya, sebagai pelaku utama sama kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan tindak lanjutannya. Bahkan sejak awaal sebenarnya struktur dan mekanisme itu harus dibentuk oleh masyarakat setempat sendiri. Beraapa hal yang harus diyakini

dan di pahami oleh para pengorganisir rakyat menurut Jo Han Tann dan Topatimasang, antara lain:

- a) Masyarakat manapun di dunia ini sebenarnya sudah memiliki organisasi mereka sendiri. Bahkan masyarakat yang paling sederhana dan terpencilpun sudah mengenal dan mempraktekan kehidupan organisasi. Karena itu mulailah dari apa yang sudah mereka jalankan selama ini.
- b) Struktur mekanisme kerja kelembagaan yang khas tingkat masyarakat biasa yang sangat berbeda yang selama ini dikenal dalam teori-teori manajemen ilmiah modern yang di praktekkan di banyak ORNOP (NGO) Selama ini. Secara tradisional, proses-proses kolektif di kalangan masyarakat selama ini sebenarnya adalah proses-proses pembagian kerja atau tugas berdasarkan fungsi masing-masing, sebagai suatu tim, sesuai dengan kemampuan setiap anggota masyarakat tersebut. Durkheim menyebutnya sebagai pranata sosial (*sosil instituton*). Setiap pranata sosial di masyarakat memiliki struktur sosial yang khas dan fungsional serta bersifat eksternal dan koersif . Misalnya tradisi keagamaan yang berlaku pada masyarakat tradisional adalah suatu pranata sosial yang memiliki struktur sosial khas dan fungsional anggota-anggota masyarakatnya. Karena itu, Jangan membangun suatu struktur dan mekanisme yang hierarkis ,karea juga akan berdampak negatif pada sikap dan perilaku masyarakat sendiri, antara lain yang terpenting, mereka lantas akan menganggap fungsi yang mereka jalankan dalam organisasi

tersebut sebagai suatu jabatan kaaaarier, lalu diminta gaji tetap, dan seterusnya.

- c) Struktur-struktur organisasi atau lembaga tradisional mengandung banyak masalah, antara lain, yang paling sering dikemukakan adalah sifatnya yang serba paternalistik, primodial, bahkan banyak yang sangat feodal dan patriarkis. Karena itu, pengorganisasian rakyat tidak sekadar membentuk dan membangun struktur kelembagaan dan mekanisme kerja organisasi tradisional lokal, tetapi sekaligus juga berarti membangun nilai-nilai, memberi makna baru pada struktur-struktur tradisional tersebut agar menjadi lebih terbuka, lebih demokratis dan egaliter, lebih partisipatif dan lebih berwawasan kesetaraan atau keadilan gender.

